

6-30-2012

HUBUNGAN KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBERADAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC INDONESIA

Putri Andarini
Universitas Diponegoro, putri.andarini@gmail.com

Indira Januarti
Universitas Diponegoro, indira_ppa@yahoo.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki>

Recommended Citation

Andarini, Putri and Januarti, Indira (2012) "HUBUNGAN KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBERADAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC INDONESIA," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*: Vol. 9: Iss. 1, Article 6.

DOI: 10.21002/jaki.2012.06

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki/vol9/iss1/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Economics & Business at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Volume 9 - No. 1, Juni 2012

HUBUNGAN KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBERADAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO PADA PERUSAHAAN *GO PUBLIC* INDONESIA

Putri Andarini

Universitas Diponegoro
putri.andarini@gmail.com

Indira Januarti

Universitas Diponegoro
indira_ppa@yahoo.com

Abstract

This study aims to examine the association between board of commissioner and firm characteristics to the existence of risk management committee (RMC) and type of RMC, whether it is combined or separated from audit committee. The board of commissioner and firm characteristics used in this study are independent commissioner, board size, auditor reputation, complexity, financial reporting risk, leverage, and firm size. Population consists of Bursa Efek Indonesia (BEI)-listed companies from nonfinancial industry in 2007-2008. Sample was collected based on purposive sampling, and resulted 248 companies as a final sample. Data was collected from the annual report, and was analysed with logistic regression. The results, based on logistic regression analyses, indicated that firm size has a positive and significant association with the existence of RMC and separated RMC. The other variables (independent commissioner, board size, auditor reputation, complexity, financial reporting risk, leverage) have no significant association with the existence of RMC and separated RMC.

Keywords : *risk management committee, corporate governance, firm characteristics*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan karakteristik dewan komisaris dan perusahaan terhadap keberadaan *risk management committee* (RMC) dan tipe RMC yang dibentuk, apakah tergabung ataukah terpisah dengan komite audit. Karakteristik dewan komisaris dan perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi komisaris independen, ukuran dewan, reputasi auditor, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Populasi yang digunakan adalah perusahaan nonfinansial yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2008. Sampel diambil dengan *purposive sampling* dan menghasilkan sampel akhir sebanyak 248 perusahaan. Data diambil dari laporan tahunan perusahaan dan dianalisis dengan alat analisis regresi logistik. Hasil dari regresi logistik menunjukkan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan berhubungan positif terhadap keberadaan RMC dan tipe RMC yang terpisah (SRMC). Sedangkan variabel lainnya (komisaris independen, ukuran dewan, reputasi auditor, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, *leverage*) tidak berhubungan signifikan dengan keberadaan RMC dan RMC yang terpisah (SRMC).

Kata kunci : *risk management committee, corporate governance, karakteristik perusahaan*

PENDAHULUAN

Semakin banyaknya perusahaan besar yang mengalami masalah kebangkrutan seperti *Enron* dan *WorldCom*, serta terjadinya

krisis keuangan global ditahun 2008 menjadi faktor pendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan penerapan sistem manajemen risikonya. Selain berfokus pada risiko yang mengancam profitabilitasnya, perusahaan

juga harus mempertimbangkan risiko yang mengancam eksistensinya. Lingkungan perusahaan yang berkembang pesat juga mengakibatkan makin kompleksnya risiko bisnis yang harus dihadapi perusahaan. Berbagai profil risiko yang dihadapi perusahaan saat ini berbeda dengan profil risiko pada dekade sebelumnya (Beasley 2007; COSO 2009). Perubahan teknologi, globalisasi, dan perkembangan transaksi bisnis seperti *hedging* dan *derivative* menyebabkan makin tingginya tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola risiko yang harus dihadapinya (Beasley 2007). Akibatnya, untuk menghadapi segala tantangan tersebut, penerapan sistem manajemen risiko secara formal dan terstruktur merupakan suatu keharusan bagi perusahaan. Apabila dilaksanakan dengan efektif, sistem manajemen risiko dapat menjadi sebuah kekuatan bagi pelaksanaan *good corporate governance*.

Aspek pengawasan merupakan kunci penting demi berjalannya sistem manajemen risiko perusahaan yang efektif. Dewan komisaris berperan dalam mengawasi penerapan manajemen risiko untuk memastikan perusahaan memiliki program manajemen risiko yang efektif (Krus dan Orowitz 2009). Untuk meringankan beban tanggungjawabnya yang begitu luas, dewan komisaris dapat mendelegasikan tugas pengawasan risiko kepada komite. Komite tersebut diharapkan dapat mendiskusikan kebijakan dan panduan untuk mengatur proses manajemen risiko perusahaan (Krus dan Orowitz 2009). Komite dapat berbentuk komite audit atau komite lain yang terpisah dari audit dan berdiri sendiri, meskipun demikian tanggung jawab utama dari pengawasan manajemen risiko tetap di tangan dewan komisaris secara penuh (Subramaniam et al. 2009).

Beberapa perusahaan masih mendelegasikan tugas pengawasan risiko kepada komite auditnya (Beasley 2007; Bates dan Leclerc 2009; Krus dan Orowitz 2009; COSO 2009). Namun, luasnya tanggung jawab dan tugas komite audit yang semakin berat

semakin menimbulkan keraguan mengenai kemampuannya untuk berfungsi secara efektif (Harrison 1987; Bates dan Leclerc 2009). Tugas pengawasan manajemen risiko membutuhkan pemahaman yang cukup mengenai struktur dan operasi perusahaan secara keseluruhan beserta risiko-risiko yang terkait, seperti risiko produk, risiko teknologi, risiko kredit, risiko peraturan, dan sebagainya (Bates dan Leclerc 2009). Alasan inilah yang menjadi landasan beberapa perusahaan untuk menerapkan fungsi pengawasan tersebut pada suatu komite yang terpisah dari komite audit dan berdiri sendiri, yang secara khusus menangani peran pengawasan dan manajemen risiko perusahaan, atau disebut dengan *risk management committee* (RMC).

Di Indonesia sendiri, perkembangan RMC mulai meningkat. Pemerintah mulai memandatkan pembentukan RMC sebagai komite pengawas risiko pada industri perbankan. Namun, berbeda dari industri perbankan dan finansial yang diregulasi secara ketat, pembentukan RMC pada sektor industri lainnya di Indonesia masih bersifat sukarela. Dalam sektor perbankan, istilah RMC disebut sebagai Komite Pemantau Risiko, melalui Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagai suatu kewajiban.

Sebagian besar penelitian terdahulu yang membahas hubungan karakteristik dewan dan perusahaan terhadap keberadaan komite hanya berfokus mengenai komite audit (Carson 2002; Firth dan Rui 2007; Chen et al. 2009), komite nominasi (Carson 2002; Ruigrok et al. 2006), dan komite remunerasi (Carson 2002). Carson (2002) menemukan hasil yang berbeda pada keberadaan komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi. Keberadaan komite audit ditemukan berhubungan positif dengan auditor *Big Six* dan jumlah hubungan *intercorporate* komisaris dalam perusahaan. Komite remunerasi berhubungan positif pula dengan auditor *Big Six*, hubungan *intercorporate*, dan kepemilikan institusi. Sementara itu,

keberadaan komite nominasi tidak berhubungan dengan auditor *Big Six*, komisaris, maupun investor, namun berhubungan dengan ukuran dewan dan *leverage* (Carson 2002).

Penelitian Ruigrok et al. (2006) menemukan bahwa perusahaan dengan komite nominasi cenderung memiliki jumlah komisaris independen dan asing serta keragaman kebangsaan dalam perusahaan yang lebih tinggi pula. Selanjutnya, Firth dan Rui (2007) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan saham terdispersi, proporsi komisaris independen yang lebih tinggi, dan auditor eksternal non *Big Five* cenderung untuk mengadopsi komite audit secara sukarela. Chen et al. (2009) juga menemukan bahwa faktor-faktor seperti *leverage*, ukuran perusahaan, ukuran dewan, proporsi komisaris independen, dan CEO independen berhubungan positif dengan pembentukan komite audit secara sukarela.

Berbeda dengan ketiga komite di atas, hingga saat ini penelitian yang membahas pembentukan RMC secara khusus masih sangat jarang. Salah satu sebab yang mendasari hal ini adalah sedikitnya bukti empiris mengenai formasi dan struktur dari RMC (Subramaniam et al. 2009). Selain itu, RMC juga merupakan isu yang tergolong masih baru. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan mereplikasi penelitian serupa oleh Subramaniam et al. (2009).

Tujuan dari replikasi ini adalah untuk mengetahui hasil penelitian di Indonesia dan membandingkannya dengan hasil penelitian sebelumnya di Australia. Perbedaan sampel, karakteristik dewan komisaris dan perusahaan, serta regulasi antara Indonesia dan Australia memungkinkan hasil yang berbeda dalam penelitian ini.

Penelitian ini akan menguji hubungan antara karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap keberadaan RMC dan tipe RMC yang dibentuk perusahaan, apakah tergabung dengan komite audit atau terpisah dan berdiri sendiri. Penelitian ini menggunakan faktor-faktor terkait dengan karakteristik dewan komisaris dan perusahaan

sebagai variabel independen. Karakteristik dewan komisaris yang diteliti pada penelitian ini meliputi komisaris independen dan ukuran dewan. Sementara karakteristik perusahaan yang diteliti meliputi reputasi auditor, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena masih jarang ditemukan penelitian serupa di Indonesia. Hingga sekarang juga masih sulit untuk mendapatkan penelitian mengenai RMC secara khusus. Selain itu, isu-isu mengenai risiko dan pengawasan manajemen risiko juga sedang hangat dibicarakan (Beasley 2007).

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Pada teori agensi, baik *principal* maupun *agent* diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional dan semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadinya masing-masing. Dari situasi ini timbullah konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Untuk meredam tindakan para *agent* yang tidak sesuai dengan kepentingannya, *principal* memiliki dua cara yaitu (Jensen dan Meckling 1976; Subramaniam et al. 2009) :

1. Mengawasi perilaku *agent* dengan mengadopsi fungsi audit dan mekanisme *corporate governance* lain yang dapat meluruskan kepentingan *agent* dengan kepentingan *principal*.
2. Menyediakan insentif kepegawaian yang menarik kepada *agent* dan mengadakan struktur *reward* yang dapat membujuk para *agent* untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik *principal*.

Agency theory sering digunakan sebagai landasan dalam penelitian-penelitian sebelumnya mengenai *corporate governance*, khususnya tentang keberadaan komite. Hal ini dikarenakan pentingnya aspek pengawasan (*monitoring*) demi terwujudnya *good corporate governance*. Apabila dilihat dari perspektif

agensi, terdapat dua mekanisme pengawasan manajemen yang umum, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Mekanisme pengawasan internal adalah dewan komisaris dan komite (Ruigrok et al. 2006; Firth dan Rui 2007; Chen et al. 2009), sedangkan mekanisme pengawasan eksternal adalah auditor eksternal (Subramaniam et al. 2009).

Komite yang dibentuk dewan komisaris merupakan mekanisme *corporate governance* yang efektif untuk mengatasi masalah agensi (Cai et al. 2008). Umumnya, komite tersebut diprediksi ada ketika situasi *agency cost* cenderung tinggi, misalnya *leverage* tinggi, dan ukuran perusahaan yang cukup besar pula (Subramaniam et al. 2009; Chen et al. 2009).

Signalling Theory

Salah satu teori yang dapat melatar belakangi masalah asimetri informasi dalam pasar adalah *signalling theory*. Ketika digunakan dalam praktek pengungkapan perusahaan, *signalling theory* secara umum menguntungkan bagi perusahaan untuk mengungkapkan praktek *corporate governance* yang baik, sehingga dapat menciptakan kualitas perusahaan yang baik dalam pasar (Subramaniam et al. 2009). Salah satu bentuk sinyal tentang kualitas perusahaan tersebut adalah pembentukan komite, yang memberikan informasi bahwa perusahaan tersebut lebih baik dalam segi pengawasan dibandingkan dengan perusahaan lain.

Menurut *signalling theory*, walaupun belum ada peraturan yang memandatkan mengenai pembentukan RMC sebagai komite yang secara khusus berperan dalam pengawasan risiko, perusahaan tetap dapat membentuk RMC dalam komitmennya menuju praktek *good corporate governance*. Harrison (1987) menyatakan mungkin sulit untuk mengamati pekerjaan apa yang sebenarnya dilakukan oleh komite, namun terdapat kemungkinan bahwa komite pengawas dibentuk untuk menciptakan penampilan perusahaan yang menyenangkan bagi pihak luar.

Efficient Market Hypothesis (EMH)

Pada teori ini, terminologi efisien merujuk pada efisiensi secara informasi (*informationally efficient*). Teori ini menyatakan jika pasar efisien, maka harga merefleksikan seluruh informasi yang ada. Berkaitan dengan EMH, pasar modal Indonesia sendiri, termasuk dalam golongan setengah kuat (*semi-strong form*) (Mahendra 2008). Harga sekuritas pada pasar modal Indonesia bereaksi terhadap informasi yang dipublikasikan emiten, seperti laporan keuangan, pengumuman pembagian dividen, dan sebagainya.

Risk Management Committee (RMC)

RMC menjadi populer sebagai mekanisme pengawas risiko yang penting bagi perusahaan (Subramaniam et al. 2009). Hal ini makin diperkuat dengan *survey* oleh KPMG (2005) pada perusahaan-perusahaan Australia, yang menyatakan bahwa lebih dari setengah responden (54%) telah memiliki RMC, dimana sebesar 70% tergabung dengan komite audit. Menurut Subramaniam et al. (2009), secara umum area tugas dan wewenang RMC adalah :

1. Mempertimbangkan strategi manajemen risiko organisasi;
2. Mengevaluasi operasi manajemen risiko organisasi;
3. Menaksir pelaporan keuangan organisasi; dan
4. Memastikan bahwa organisasi dalam prakteknya memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam pembentukannya, RMC dapat tergabung dengan audit atau dapat pula menjadi komite yang terpisah dan berdiri sendiri. Komite terpisah yang secara khusus berfokus pada masalah risiko (RMC), dinilai dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mendukung dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam tugas pengawasan risiko dan manajemen pengendalian internal (Subramaniam et al. 2009). RMC yang terpisah dari audit akan lebih dapat mencurahkan lebih banyak waktu dan usaha untuk menggabungkan berbagai risiko yang dihadapi perusahaan

secara luas dan mengevaluasi pengendalian terkait secara keseluruhan (Subramaniam et al. 2009). Selain itu, RMC yang terpisah dari audit juga lebih memungkinkan dewan komisaris dalam memahami profil risiko perusahaan dengan lebih mendalam (Bates dan Leclerc 2009).

Komisaris Independen

Proporsi anggota independen dalam dewan komisaris dapat dikatakan sebagai indikator independensi dewan dari manajemen. Kehadiran komisaris independen dalam dewan dapat menambah kualitas aktivitas pengawasan dalam perusahaan, karena mereka tidak terafiliasi dengan perusahaan sebagai pegawai, hal ini merupakan keterwakilan independen dari kepentingan *shareholder* (Pincus et al. 1989 dalam Subramaniam et al. 2009; Firth dan Rui 2007). Perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang tinggi cenderung lebih memperhatikan risiko dan memandang pembentukan RMC sebagai sumber daya penting dalam membantu mereka menghadapi tanggung jawab pengawasan manajemen risiko dibanding perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang rendah (Carson 2002; Chen et al. 2009).

Penelitian Firth dan Rui (2007) dan Chen et al. (2009) menghasilkan bukti bahwa proporsi komisaris independen berhubungan positif dengan keberadaan komite audit. Hasil serupa juga diperoleh oleh penelitian Ruigrok et al. (2006), yang menyatakan bahwa perusahaan dengan proporsi komisaris independen lebih besar cenderung untuk membentuk komite nominasi secara sukarela. Keputusan Direksi BEJ Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang pembentukan komisaris independen menjadi salah satu hal yang diwajibkan bagi perusahaan publik yang terdaftar di bursa. Perusahaan publik wajib memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Persentase ini dianggap bisa mewakili *stakeholder* yang dianggap minoritas, sehingga kemungkinan terjadinya perbedaan perlakuan antara

stakeholder mayoritas dan minoritas tidak akan terjadi.

H_{1(a)} : Proporsi Komisaris Independen berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan fungsi RMC.

H_{1(b)} : Proporsi Komisaris Independen berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan fungsi RMC yang terpisah.

Ukuran Dewan

Ukuran dewan yang besar dapat mempengaruhi terbentuknya komite baru (Carson 2002; Chen et al. 2009). Ukuran dewan yang besar dapat menjadi sumber daya yang besar pula untuk dewan komisaris. Pertukaran keahlian, informasi, dan pikiran juga akan terjadi lebih luas, sehingga akan lebih mudah untuk menemukan sumber daya yang tepat dalam dewan komisaris untuk dialokasikan dalam tugas RMC. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian Subramaniam et al. (2009) yang menyatakan bahwa ukuran dewan berhubungan positif dengan keberadaan RMC. Dalam konteks Indonesia, keanggotaan Komite dapat berasal dari pihak luar yang bukan dari anggota Dekom. Karena dapat berasal dari luar Dekom, maka ukuran Dekom menjadi tidak penting dalam menentukan keberadaan RMC. Dengan demikian dapat disimpulkan, dengan banyaknya sumber daya yang dimiliki dewan komisaris, semakin tinggi tuntutan untuk membentuk RMC gabungan.

H_{2(a)} : Ukuran Dewan berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan fungsi RMC.

H_{2(b)} : Ukuran Dewan berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan fungsi RMC yang terpisah (SRMC).

Reputasi Auditor

Auditor *Big Four* dipandang memiliki reputasi baik. Secara umum akan memberikan panduan kepada kliennya mengenai praktek *corporate governance* terbaik, khususnya mengenai pembentukan RMC (Chen et al.

2009). Auditor *Big Four*, dalam hal ini yang memiliki reputasi baik, cenderung lebih berfokus pada pertahanan reputasinya. Oleh karena itu, mereka akan menganjurkan klien mereka untuk mengimplementasikan *corporate governance* yang lebih baik (Carson 2002; Chen et al. 2009; Subramaniam et al. 2009). Pernyataan ini didukung dengan hasil penelitian Chen et al. (2009) dan Carson (2002) yang menyatakan bahwa auditor eksternal *Big Four* secara signifikan berhubungan positif dengan pembentukan komite baru secara sukarela.

Terdapat tekanan yang lebih besar pada perusahaan yang diaudit *Big Four* untuk membentuk RMC, dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit non-*Big Four*. Adanya RMC dipandang sebagai dukungan tambahan ketika auditor sedang menilai sistem *monitoring* risiko internal, mereka lebih memilih untuk meminimalisasi kerugian reputasi dengan kegagalan audit (Subramaniam et al. 2009). Dibanding dengan komite gabungan, RMC terpisah akan lebih dipilih oleh *Big Four*, karena cenderung dapat meningkatkan kualitas dari penilaian dan pengawasan risiko.

H_{3(a)} : Perusahaan yang diaudit oleh *Big Four* kemungkinan lebih besar memiliki RMC dibanding perusahaan yang tidak diaudit oleh *Big Four*.

H_{3(b)} : Perusahaan yang diaudit oleh *Big Four* kemungkinan lebih besar memiliki RMC yang terpisah (SRMC) dibanding perusahaan yang tidak diaudit oleh *Big Four*.

Kompleksitas Bisnis

Secara umum, kompleksitas perusahaan dapat dilihat dari jumlah segmen bisnis yang dimilikinya. Kompleksitas perusahaan yang besar dapat meningkatkan risiko dalam *level* yang berbeda, termasuk risiko operasional dan teknologi, sehingga dibutuhkan mekanisme pengawasan risiko yang lebih besar (Subramaniam et al. 2009). Perusahaan dengan kompleksitas yang besar diperkirakan

cenderung memiliki RMC, dengan tujuan mengecilkan risiko yang dihadapinya. Selanjutnya, RMC yang terpisah juga akan lebih dipilih oleh perusahaan dengan kompleksitas besar, karena komite yang terpisah cenderung dapat memfasilitasi kualitas pengawasan risiko yang lebih baik, baik dalam segi waktu maupun usaha dari anggotanya (Subramaniam et al. 2009).

H_{4(a)} : Kompleksitas bisnis berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan fungsi RMC.

H_{4(b)} : Kompleksitas bisnis berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan fungsi RMC yang terpisah.

Risiko Pelaporan Keuangan

Perusahaan dengan proporsi aset yang lebih besar pada piutang usaha dan persediaan cenderung memiliki risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi, karena tingginya ketidakpastian dalam data akuntansi (Korosec dan Horvat 2005). Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan dimana jumlah piutang dan persediaan biasanya cukup besar sehingga lebih berisiko dibandingkan perkiraan yang lain (misal *intangible asset*). Piutang usaha dan persediaan dapat menimbulkan kesalahan penilaian ketika proporsinya semakin besar dalam aset. Potensi kesalahan perhitungan yang besar ini menimbulkan risiko pelaporan yang tinggi. Oleh karena itu, keberadaan RMC, khususnya RMC yang terpisah akan dapat memfasilitasi perusahaan dengan kualitas pengawasan risiko pelaporan keuangan yang lebih baik (Subramaniam et al. 2009). RMC yang terpisah dianggap dapat menghasilkan kinerja yang lebih efektif dalam pengawasan risiko.

H_{5(a)} : Risiko pelaporan keuangan berhubungan positif dengan keberadaan fungsi RMC.

H_{5(b)} : Risiko pelaporan keuangan berhubungan positif dengan keberadaan fungsi RMC yang terpisah.

Leverage

Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung memiliki biaya agensi yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan tingginya risiko keuangan yang harus dihadapi. Perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung untuk memiliki risiko *going concern* yang tinggi (Subramaniam et al. 2009). Terkait dengan fungsi pengawasan, kreditor sebagai pihak pemberi utang cenderung menuntut perusahaan untuk memiliki pengendalian internal yang lebih baik. Konsekuensinya, perusahaan dengan *leverage* tinggi akan memiliki tuntutan kuat untuk membentuk RMC dengan tujuan mengawasi risiko *going concern* tersebut. RMC yang terpisah cenderung dapat berfungsi dengan lebih efektif dalam pengawasan risiko.

H_{6(a)} : Leverage berhubungan positif dengan keberadaan fungsi RMC.

H_{6(b)} : Leverage berhubungan positif dengan keberadaan fungsi RMC yang terpisah.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi terbentuknya komite baru secara sukarela (Chen et al. 2009). Perusahaan dengan ukuran besar cenderung berpotensi untuk memiliki masalah agensi yang lebih besar, karena lebih sulit untuk melakukan tindakan *monitoring* (Jensen dan Meckling 1976).

Perusahaan dengan ukuran besar umumnya juga cenderung untuk mengadopsi praktek *corporate governance* dengan lebih baik dibanding perusahaan kecil. Hal ini terkait dengan besarnya tanggung jawab perusahaan kepada para *stakeholder* karena dasar kepemilikan yang lebih luas. Selain itu, semakin besar perusahaan, semakin besar pula risiko yang harus dihadapinya, termasuk keuangan, operasional, reputasi, peraturan, dan risiko informasi (KPMG 2001). Konsekuensinya, perusahaan dengan ukuran besar akan memiliki tuntutan kuat untuk membentuk RMC yang bertujuan mengawasi berbagai risiko tersebut. RMC yang terpisah dinilai lebih efektif dalam pengawasan risiko.

H_{7(a)} : Ukuran perusahaan berhubungan positif dengan keberadaan fungsi RMC.

H_{7(b)} : Ukuran perusahaan berhubungan positif dengan keberadaan fungsi RMC yang terpisah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan nonfinansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2008 yang telah mempublikasikan laporan tahunannya. Populasi tahun 2007-2008 diambil untuk mengetahui perkembangan RMC pada jenis industri nonfinansial. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling* (terdaftar di BEI dan menerbitkan laporan tahunan 2007-2008, disajikan dalam rupiah, dan memiliki informasi lengkap).

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Terdapat dua variabel dependen dalam penelitian ini, yang keduanya sama-sama merupakan variabel dikotomous, yaitu:

1. Keberadaan RMC

Dalam penelitian ini, konseptualisasi dari keberadaan RMC dalam perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Tidak ada RMC, dimana perusahaan belum membentuk ataupun mengungkapkan keberadaan dari RMC.
- b. Ada RMC, dimana terbagi menjadi dua tipe :
 - (a) RMC yang tergabung – dimana laporan tahunan mengungkapkan keberadaan suatu komite di bawah audit dan RMC. RMC yang tergabung biasanya dijalankan oleh komite audit.
 - (b) RMC yang terpisah – dimana laporan tahunan mengungkapkan

keberadaan komite terpisah dari audit, yang secara khusus mengawasi manajemen risiko, atau disebut sebagai RMC. Fungsi RMC yang terpisah dijalankan oleh komite tersendiri diluar komite audit.

Perusahaan yang mengungkapkan keberadaan RMC dalam laporan tahunannya diberikan nilai satu (1), sebaliknya nilai nol (0) (Subramaniam et al. 2009).

2. RMC Terpisah dari Audit/Berdiri Sendiri (SRMC)

Dalam pembentukannya, RMC dapat tergabung dengan komite audit maupun terpisah dan berdiri sendiri. Perusahaan yang mengungkapkan keberadaan RMC terpisah dari audit dan berdiri sendiri (SRMC) dalam laporan tahunannya diberikan nilai satu (1) dan sebaliknya nilai nol (0) (Subramaniam et al. 2009).

Contoh perusahaan yang ada RMC dan RMC terpisah dari komite audit adalah PT Bakrie & Brothers Tbk tahun 2008, menyebutkan dalam laporan keuangannya : “Komite manajemen risiko bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan penilaian kebijakan manajemen risiko yang diterapkan direksi serta memastikan bahwa semua risiko telah diantisipasi dan aset-aset berisiko telah diasuransikan dengan semestinya.”

Selain itu, disebutkan pula dalam laporan tahunan bahwa :

“Tim manajemen risiko dan tim audit internal korporasi menyiapkan satu paket laporan kepada direktur utama, mengkoordinasikan dan mendiskusikan rencana serta hasil kegiatannya kepada komite manajemen risiko dan komite audit perusahaan secara periodik.”

Variabel Independen

Variabel Independen dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Komisaris Independen

Proporsi jumlah komisaris independen dapat menggambarkan tingkat independensi

dan objektivitas dewan dalam pengambilan keputusan (Spira dan Bender 2004). Independensi dewan komisaris dinyatakan dalam persentase jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Subramaniam et al. 2009).

2. Ukuran Dewan

Ukuran dewan dalam penelitian ini, diukur dengan menjumlah seluruh anggota yang tergabung dalam dewan komisaris (Subramaniam et al. 2009).

3. Reputasi Auditor

Reputasi auditor dinyatakan dengan apakah auditor yang digunakan oleh perusahaan termasuk dalam *Big Four* atau tidak. Perusahaan yang menggunakan KAP *Big Four* sebagai auditor eksternalnya diberikan nilai satu (1) dan sebaliknya diberikan nilai nol (0) (Subramaniam et al. 2009).

4. Kompleksitas

Kompleksitas perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menjumlah segmen usaha yang dimiliki perusahaan (Subramaniam et al. 2009). Jumlah segmen usaha dilihat di catatan atas laporan keuangan pada bagian segmen usaha.

5. Risiko Pelaporan Keuangan

Piutang usaha dan persediaan mempunyai kemungkinan kesalahan dalam penilaian, sehingga dapat meningkatkan risiko pelaporan keuangan. Karena yang dipakai adalah perusahaan non keuangan, maka piutang dan persediaan merupakan jumlah aset yang dipandang signifikan dan berisiko. Variabel risiko pelaporan keuangan dalam penelitian ini diukur dengan membagi total piutang dan persediaan dengan aset yang dimiliki perusahaan (Subramaniam et al. 2009).

6. Leverage

Leverage digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Variabel ini diukur dengan membagi jumlah hutang dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Carson 2002).

7. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat menggambarkan besar kecilnya skala ekonomi suatu perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan menghitung *log* normal jumlah aset yang dimiliki perusahaan (Chen et al. 2009).

Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa laporan tahunan (*annual report*) perusahaan *go public* yang terdaftar dalam BEI. Laporan tahunan (*annual report*) diperoleh dari Pojok BEI Fakultas Ekonomi UNDIP, *website* resmi BEI, dan *website* resmi perusahaan.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah regresi logistik (*Logistic Regression*). Regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas, heteroskedasitas, dan uji asumsi klasik pada variabel dependennya (Ghozali 2005). Regresi logistik dipilih karena penelitian ini memiliki variabel dependen yang *dichotomous* (Subramaniam et al. 2009) dan variabel independen yang bersifat kombinasi antara *metric* dan *non metric* (nominal).

Terdapat dua model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis, yaitu :

$$(1)\text{logit(RMC)} = \alpha + \beta_1(\text{INDPCOM}) + \beta_2(\text{BOARDSIZE}) + \beta_3(\text{BIGFOUR}) + \beta_4(\text{BUSSEGMENT}) + \beta_5(\text{RISKREPORT}) + \beta_6(\text{LEV}) + \beta_7(\text{SIZE}) + e.$$

$$(2)\text{logit(SRMC)} = \alpha + \beta_1(\text{INDPCOM}) + \beta_2(\text{BOARDSIZE}) + \beta_3(\text{BIGFOUR}) + \beta_4(\text{BUSSEGMENT}) + \beta_5(\text{RISKREPORT}) + \beta_6(\text{LEV}) + \beta_7(\text{SIZE}) + e.$$

Dimana :

RMC = Keberadaan RMC (*variabel dummy*, nilai 1 untuk perusahaan yang memiliki RMC dan nilai 0 untuk sebaliknya).

SRMC	=	Keberadaan RMC yang terpisah dari audit dan berdiri sendiri (<i>variabel dummy</i> , nilai 1 untuk perusahaan yang memiliki RMC terpisah dan 0 untuk sebaliknya).
α	=	Konstanta
INDPCOM	=	Proporsi komisaris independen
BOARDSIZE	=	Ukuran dewan
BIGFOUR	=	Variabel <i>dummy</i> auditor eksternal perusahaan (nilai 1 untuk auditor <i>Big Four</i> dan 0 untuk sebaliknya)
BUSSEGMENT	=	Kompleksitas
RISKREPORT	=	Risiko pelaporan keuangan
LEV	=	<i>Leverage</i>
SIZE	=	Ukuran perusahaan
e	=	<i>error</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel penelitian dipilih dengan cara *purposive sampling*. Sampel yang masuk kriteria sebanyak 124 perusahaan nonfinansial. Untuk dua tahun pengamatan 2007-2008 sehingga diperoleh total sampel sebanyak 248 perusahaan (Tabel 1).

Jumlah dan persentase perusahaan yang mengungkapkan keberadaan RMC dan SRMC dan perkembangan RMC serta SRMC selama dua tahun disajikan dalam Tabel 2. Tabel 2 menunjukkan total sampel sejumlah 248 perusahaan nonfinansial, 141 perusahaan atau 56,9% mengungkapkan keberadaan RMC. Sebanyak 68 perusahaan mengungkapkan keberadaan RMC pada tahun 2007, dan 73 perusahaan pada tahun 2008. Dapat dikatakan bahwa perusahaan yang mengungkapkan keberadaan RMC selama tahun 2007-2008 mengalami perkembangan sebesar 7,35% (Gambar 1).

Tabel 3 menunjukkan dari 141 perusahaan yang mengungkapkan keberadaan RMC, sejumlah 39 perusahaan atau 27,7% mengungkapkan RMC yang terpisah dari audit dan berdiri sendiri (SRMC). Sebanyak 19 perusahaan mengungkapkan keberadaan SRMC pada tahun 2007, dan 20 perusahaan pada tahun 2008. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perusahaan yang mengungkapkan keberadaan SRMC selama

Tabel 1
Penentuan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan nonfinansial terdaftar di BEI dan menerbitkan laporan tahunan tahun 2007-2008	156
Perusahaan menyajikan laporan tahunan tidak dalam bentuk mata uang rupiah	(11)
Perusahaan menyajikan laporan tahunan dalam bentuk mata uang rupiah	145
Perusahaan dengan informasi tidak lengkap	(21)
Perusahaan dengan informasi lengkap	124
Total sampel penelitian (dua tahun pengamatan)	248

Tabel 2
Jumlah Perusahaan yang Mengungkapkan Keberadaan RMC Tahun 2007-2008

Tahun	RMC	Presentase (%)	N-RMC	Presentase (%)
2007	68 perusahaan	54,8	56 perusahaan	45,2
2008	73 perusahaan	58,9	51 perusahaan	41,1
Jumlah	141 perusahaan	56,9	107 perusahaan	43,1

Tabel 3
Jumlah Perusahaan yang Mengungkapkan Keberadaan SRMC Tahun 2007-2008

Tahun	SRMC	Presentase (%)	N-SRMC	Presentase (%)
2007	19 perusahaan	27,9	49 perusahaan	72,1
2008	20 perusahaan	27,4	53 perusahaan	72,6
Jumlah	39 perusahaan	27,7	102 perusahaan	72,3

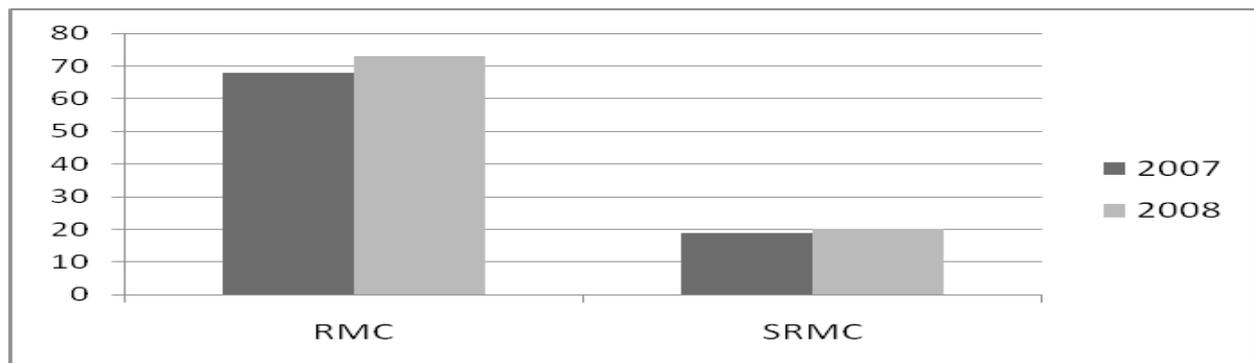
Sumber : data yang diolah

tahun 2007-2008 mengalami perkembangan sebesar 5,26% (Gambar 1).

Sampel perusahaan industri nonfinansial *go public*, menurut *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) terbagi menjadi 12 klasifikasi industri. Tiap klasifikasi industri memiliki persentase yang berbeda dalam pengungkapan keberadaan RMC dan SRMC (Tabel 4).

Dari hasil pengamatan, diketahui bahwa dalam kinerjanya, RMC bertanggung jawab secara langsung terhadap dewan komisaris. Seperti komite bentukan dewan komisaris lainnya, RMC juga berkewajiban menyusun

laporan kinerjanya secara periodik. Tidak semua RMC terpisah (SRMC) (Tabel 4) dalam perusahaan nonfinansial dan tidak semua diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Beberapa hanya diketuai oleh seorang komisaris atau anggota biasa. Anggota RMC sebagai komite terpisah sendiri, umumnya berkisar antara dua sampai empat orang. Sebagian besar anggota RMC memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan keuangan. Sebagian lagi memiliki latar belakang pendidikan di bidang dimana perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya. Kombinasi yang tepat ini tentunya menjadi sumber daya



Gambar 1
Perkembangan RMC dan SRMC Tahun 2007-2008

Tabel 4
Persentase Perusahaan dengan RMC dan SRMC menurut Klasifikasi Industri Tahun 2007-2008

No	Klasifikasi Industri	Sampel Masing-Masing Industri	RMC		SRMC	
			N	%	N	%
1	<i>Agriculture, forestry, and fishing</i>	6	4	66,67	4	100
2	<i>Animal feed and husbandry</i>	4	2	50	0	0
3	<i>Mining and mining service</i>	10	10	100	8	80
4	<i>Construction</i>	10	6	60	4	66,67
5	<i>Manufactur</i>	72	44	61,11	8	18,18
6	<i>Transportation service</i>	14	6	42,86	0	0
7	<i>Telecommunication</i>	10	10	100	6	60
8	<i>Whole sale and retail trade</i>	24	11	45,83	3	27,27
9	<i>Real estate</i>	58	23	39,66	2	8,7
10	<i>Hotel and travel service</i>	12	6	50	0	0
11	<i>Holding and other investment companies</i>	4	4	100	2	50
12	<i>Others</i>	24	15	62,5	2	13,33

penting bagi dewan komisaris dalam fungsi pengawasan manajemen risikonya.

Dalam aktivitas manajemen risiko, manajer senior dan direksi (sebagai pelaksana) secara periodik melakukan koordinasi, konsultasi, dan pelaporan kepada RMC yang terpisah (SRMC). RMC merupakan kepanjangan tangan dari Dekom (dibentuk oleh Dekom) dan fungsinya adalah sebagai komite pengawas, maka Direksi wajib melakukan pelaporan kepada RMC. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa SRMC dapat membantu dewan komisaris dalam memberikan pendapat profesional dan independen demi terlaksananya prinsip-prinsip manajemen risiko perusahaan. Karena tugas SRMC terlaksana lebih efektif dibanding RMC gabungan. Hal ini mengindikasikan

bahwa, perusahaan dengan RMC yang terpisah (SRMC) cenderung memiliki kinerja pengawasan dan penilaian manajemen risiko yang lebih terstruktur. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa SRMC lebih profesional dibanding RMC gabungan. Kajian risiko yang harus dihadapi perusahaan dilakukan dengan lebih mendalam. Latar belakang pendidikan anggota RMC menambah kemampuan dewan komisaris dalam memahami setiap profil risiko yang harus dihadapi perusahaan. Dapat dikatakan bahwa RMC yang terpisah dari audit (SRMC) memberikan kinerja lebih efektif dibanding dengan RMC yang tergabung.

Statistik deskriptif Tabel 5 menunjukkan bahwa dari total sampel yang ada, rata-rata variabel proporsi komisaris independen

Tabel 5
Statistik Deskriptif

Variabel	Total Sampel				RMC				N-RMC			
	N	Min	Max	Mean	N	Min	Max	Mean	N	Min	Max	Mean
INDPCOM (%)	248	0	1	0,4128	141	0,25	0,8	0,4109	107	0	1	0,415
BOARDSIZE	248	2	12	4,7	141	3	10	5,09	107	2	12	4,19
BUSSEGMENT	248	1	10	3,04	141	1	10	3,2	107	1	7	2,82
RISKREPORT (%)	248	0	0,903	0,31662	141	0	0,845	0,31752	107	0	0,903	0,31544
LEV (%)	248	0,013	4,006	0,55298	141	0,061	4,006	0,53647	107	0,013	2,381	0,57473
SIZE	248	8,753	13,96	12,08761	141	8,753	13,96	12,3532	107	9,471	13,166	11,73763
Valid N (listwise)	248				141				107			

Variabel	SRMC				N-SRMC			
	N	Min	Max	Mean	N	Min	Max	Mean
INDPCOM (%)	39	0,25	0,75	0,4112	102	0,3	0,8	0,411
BOARDSIZE	39	3	10	5,46	102	3	10	4,95
BUSSEGMENT	39	1	7	3,1	102	1	10	3,24
RISKREPORT (%)	39	0,005	0,823	0,26906	102	0	0,845	0,33605
LEV (%)	39	0,208	0,883	0,49791	102	0,061	4,006	0,55121
SIZE	39	11,366	13,960	12,79692	102	8,753	13,907	12,18354
Valid N (listwise)	39				102			

Sumber : *output* statistik

(INDPCOM) adalah 41,28%, dengan nilai terendah 0% dan nilai tertinggi 100%. Sementara itu, rata-rata proporsi komisaris independen pada perusahaan RMC sebesar 41,09%, pada perusahaan N-RMC sebesar 41,5%, pada perusahaan SRMC sebesar 41,12%, dan pada perusahaan N-SRMC sebesar 41,1%. Dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi komisaris pada masing-masing jenis perusahaan tidak jauh berbeda.

Variabel ukuran dewan (BOARDSIZE) pada Tabel 5 memiliki rata-rata total sampel 4,7 dengan nilai terendah 2 dan nilai tertinggi 12. Rata-rata ukuran dewan pada perusahaan RMC lebih tinggi, yaitu sebesar 5,09 daripada perusahaan N-RMC yang hanya memiliki rata-rata 4,19. Sementara itu, perusahaan N-SRMC memiliki rata-rata ukuran dewan sebesar 4,95 dan perusahaan SRMC memiliki rata-rata paling tinggi di antara jenis perusahaan lain, yaitu sebesar 5,46.

Sementara itu, dari total sampel yang ada, variabel kompleksitas memiliki rata-rata 3,04,

dengan nilai terendah 1 dan nilai tertinggi 10. Rata-rata kompleksitas pada perusahaan RMC jauh lebih tinggi dibanding rata-rata pada perusahaan N-RMC, yaitu sebesar 3,2 pada RMC dan 2,82 pada N-RMC. Namun, rata-rata pada perusahaan N-SRMC lebih tinggi dibanding SRMC, yaitu 3,24 untuk N-SRMC dan 3,1 untuk SRMC.

Variabel risiko pelaporan keuangan memiliki rata-rata total sampel sebesar 31,66% dengan nilai terendah 0% dan nilai tertinggi 90,3%. Rata-rata risiko pelaporan keuangan pada perusahaan RMC dan N-RMC juga tidak jauh berbeda, yaitu sebesar 31,75% pada perusahaan RMC dan 31,54% pada perusahaan N-RMC. Sementara itu, rata-rata risiko pelaporan keuangan pada perusahaan SRMC jauh berbeda dibanding jenis perusahaan lain, yaitu sebesar 26,91%. Angka ini terpaut jauh lebih rendah dibanding rata-rata risiko pelaporan keuangan pada perusahaan N-SRMC yang bernilai 33,91%.

Tabel 5 juga menunjukkan rata-rata

variabel *leverage* dari total sampel yang ada sebesar 55,30% dengan nilai terendah 1,3% dan nilai tertinggi 400,6%. Sementara itu, perusahaan N-RMC justru memiliki rata-rata *leverage* yang lebih tinggi dibanding perusahaan RMC. Masing-masing memiliki nilai 57,47% untuk perusahaan N-RMC dan 53,65% untuk perusahaan RMC. Selain itu perusahaan N-SRMC juga memiliki rata-rata *leverage* jauh lebih tinggi dibanding perusahaan SRMC. Masing-masing bernilai sebesar 55,12% untuk perusahaan N-SRMC dan 49,79% untuk perusahaan SRMC.

Tabel 5 juga memperlihatkan rata-rata ukuran perusahaan dari total sampel sebesar 12,09 dengan nilai terendah 8,75 dan nilai tertinggi 13,96. Rata-rata ukuran perusahaan RMC sebesar 12,35. Angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata ukuran perusahaan pada perusahaan N-RMC, yaitu sebesar 11,74. Rata-rata ukuran perusahaan pada perusahaan N-SRMC sebesar 12,18. Sementara itu, rata-rata ukuran perusahaan pada perusahaan SRMC bernilai paling tinggi di antara jenis perusahaan lain, yaitu sebesar 12,80. Dari data tersebut, dapat terlihat bahwa makin besar ukuran perusahaan, makin baik pula struktur RMC yang dapat dibentuk perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis dari kedua model regresi logistik di Tabel 6 dan Tabel 7. Variabel komisaris independen tidak berhubungan signifikan dengan keberadaan RMC (0,528; Tabel 6) maupun SRMC (0,394; Tabel 7). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Carson (2002) dan Subramaniam et al. (2009). Tidak adanya hubungan ini karena kualitas dan latar belakang pendidikan anggota dewan komisaris lebih menentukan kualitas fungsi pengawasan dewan dibandingkan komposisi dan tingkat independensinya (Carson 2002). Alasan lain yang mungkin adalah pengangkatan komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja dan tidak dimaksudkan untuk menegakkan *good corporate governance*. Selanjutnya, Utama (2004) juga menyatakan bahwa ketentuan minimum komisaris independen sebesar 30% mungkin belum cukup

tinggi untuk menyebabkan para komisaris independen tersebut dapat mendominasi kebijakan yang diambil oleh dewan komisaris, khususnya tentang pembentukan komite baru.

Variabel ukuran dewan tidak berhubungan signifikan (0,161 pada Tabel 6 dan 0,238 pada Tabel 7) pada keberadaan RMC maupun SRMC. Hasil ukuran dewan tidak berhubungan signifikan, bisa jadi karena di Indonesia anggota Komite tidak harus duduk di Dekom. Dengan demikian, size Dekom menjadi tidak terlalu penting dalam pembentukan komite. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Subramaniam et al. (2009), Chen et al. (2009), dan Carson (2002) yang menyatakan bahwa ukuran dewan berhubungan signifikan terhadap terbentuknya komite baru. Ukuran dewan yang besar tidak menjamin terbentuknya komite baru secara sukarela. Dengan makin besarnya ukuran dewan, tugas pengawasan dan *risk monitoring* telah dapat dilakukan oleh dewan komisaris sendiri, sehingga tekanan untuk membentuk RMC semakin kecil. Alasan lain adalah ukuran dewan yang besar juga makin menambah masalah dalam hal komunikasi dan koordinasi. Seperti yang dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976) bahwa dengan adanya jumlah komisaris yang semakin besar maka akan membutuhkan biaya *monitoring* yang besar. Oleh sebab itu, perusahaan harus melakukan antisipasi untuk mengurangi biaya *monitoring*, salah satunya yaitu ukuran dewan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil.

Hipotesis 3 bahwa variabel reputasi auditor tidak berhubungan signifikan (0,355 pada Tabel 6 dan negatif 0,032 pada Tabel 7) dengan keberadaan RMC maupun SRMC. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya (Carson 2002). Carson (2002) menemukan hasil keberadaan komite audit ditemukan berhubungan positif dengan auditor *Big Six*. Keberadaan fungsi RMC yang tidak terpisah menjadi satu dengan komite audit. Hasil penelitian ini sama arahnya dengan Firth dan Rui (2007) yang menyatakan bahwa pembentukan komite audit secara signifikan berhubungan negatif dengan auditor

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik Model I

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 (a)	INDPCOM	-,755	1,196	,399	1	,528	,470
	BOARDSIZE	,121	,086	1,967	1	,161	1,129
	BIGFOUR	,271	,293	,857	1	,355	1,311
	BUSSEGMENT	,041	,095	,182	1	,670	1,041
	RISKREPORT	,541	,640	,714	1	,398	1,717
	LEV	,125	,430	,085	1	,771	1,134
	SIZE	,656	,197	11,113	1	,001*	1,927
	Constant	-8,369	2,252	13,805	1	,000	,000

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik Model II

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 (a)	INDPCOM	-1,996	2,339	,728	1	,394	,136
	BOARDSIZE	-,161	,136	1,390	1	,238	,852
	BIGFOUR	-,985	,459	4,599	1	,032	,367
	BUSSEGMENT	-,124	,138	,800	1	,371	,884
	RISKREPORT	-,205	1,164	,031	1	,860	,625
	LEV	-1,034	1,131	,837	1	,360	,318
	SIZE	1,873	,492	14,485	1	,000*	6,505
	Constant	-21,275	5,642	14,221	1	,000	,000

Big Five. Alasan yang mungkin mendasari adalah perusahaan cenderung menggunakan auditor eksternal *Big Four* hanya untuk menaikkan reputasinya semata. Auditor *Big Four* hanya menyarankan klien mereka untuk memperhatikan pengawasan risiko yang bersifat keuangan saja.

Variabel kompleksitas bisnis tidak berhubungan signifikan (0,670 pada Tabel 6 dan 0,371 pada Tabel 7) dengan keberadaan RMC maupun SRMC. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Subramaniam et al. (2009) yang menyatakan bahwa variabel kompleksitas tidak berhubungan secara signifikan dengan keberadaan RMC maupun SRMC, dan koefisiennya negatif (-,124) untuk tipe RMC yang terpisah (SRMC). Alasan yang mungkin mendasari adalah penelitian ini masih menggunakan *proxy* pengukuran yang sama dengan penelitian Subramaniam et al. (2009). Jumlah segmen usaha merupakan proksi pengukuran yang kurang tepat untuk variabel kompleksitas (Subramaniam et al. 2009).

Jumlah segmen usaha yang beragam tidak menjamin semakin kompleksnya aktivitas bisnis perusahaan. Perusahaan yang hanya bergerak dalam satu segmen usaha, mungkin saja memiliki segmen geografis yang tersebar luas. Hal ini pun juga dapat mengakibatkan makin kompleksnya risiko yang dihadapi perusahaan.

Variabel risiko pelaporan keuangan tidak berhubungan signifikan (0,398 pada Tabel 6 dan 0,860 pada Tabel 7) pada keberadaan RMC maupun SRMC. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Subramaniam et al. (2009) yang menyatakan bahwa keberadaan SRMC secara signifikan berhubungan positif dengan risiko pelaporan keuangan. Alasan yang mungkin mendasari adalah komite audit dan auditor internal perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding RMC dalam memastikan informasi keuangan perusahaan telah disajikan sesuai dengan prinsip yang berlaku. Auditor internal bertanggung jawab untuk memastikan pengendalian di setiap

Tabel 8
Nilai Nagelkerke R Square Model Regresi I

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	306,353	,124	,166

Tabel 9
Nilai Nagelkerke R Square Model Regresi II

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	139,995	,170	,246

kegiatan yang memiliki pengaruh terhadap pelaporan keuangan perusahaan, termasuk penilaian piutang dan persediaan.

Variabel *leverage* tidak berhubungan signifikan (0,771 pada Tabel 6 dan 0,360 pada Tabel 7) pada keberadaan RMC dan SRMC. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Subramaniam et. al. (2009). Subramaniam et. al. (2009) menemukan bahwa *leverage* tidak berhubungan secara signifikan dengan pembentukan RMC secara sukarela. *Leverage* tidak signifikan dengan pembentukan RMC karena berdasarkan data di Tabel 5 menunjukkan rata-rata antara RMC dan N-RMC tidak berbeda. Dengan demikian pembentukan RMC tidak dipengaruhi oleh *leverage*.

Ukuran perusahaan berhubungan signifikan (0,001 pada Tabel 6 dan 0,000 pada Tabel 7) pada keberadaan RMC maupun SRMC. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Chen et al. (2009), menyatakan bahwa pembentukan komite audit secara sukarela berhubungan positif dengan ukuran perusahaan dan penelitian Subramaniam et al. (2009) yang menyatakan bahwa pembentukan RMC dan RMC yang terpisah (SRMC) berhubungan positif dengan ukuran perusahaan. Chen et al. (2009) menyatakan perusahaan besar cenderung untuk lebih memperhatikan penerapan *good corporate governance* untuk menjaga nama baiknya (*good image*). Hal ini mengakibatkan dorongan untuk membentuk komite baru semakin besar. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pada perusahaan *go public* Indonesia, ukuran perusahaan merupakan faktor utama yang mempengaruhi

pembentukan RMC dan RMC yang terpisah secara sukarela. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada kondisi Indonesia, RMC dan RMC terpisah akan lebih banyak dibentuk oleh perusahaan dengan biaya agensi lebih tinggi, di mana *economic of scale* juga cenderung tinggi.

Variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 16,6%, sisanya 83,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain (Tabel 8). Sementara pada model regresi II, variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 24,6%, sisanya 75,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain (Tabel 9).

Ketepatan model regresi I adalah 66,5% (Tabel 10), sedangkan ketepatan model regresi II adalah 80,9% (Tabel 11).

SIMPULAN

Perusahaan sampel telah mengungkapkan keberadaan RMC selama tahun 2007-2008, yaitu sebanyak 141 perusahaan atau 56% dari total sampel yang ada. Selama tahun 2007-2008 keberadaan RMC telah mengalami perkembangan sebesar 7,35%. Namun, keberadaan RMC yang terpisah dari audit dan berdiri sendiri (SRMC) masih tergolong cukup rendah, yaitu sejumlah 39 perusahaan atau 27,66% dari total sampel yang ada. Keberadaan SRMC selama tahun 2007-2008 juga hanya mengalami pertumbuhan sebesar 5,26%.

Berdasarkan hasil regresi logistik hanya ukuran perusahaan yang berhubungan positif dengan keberadaan RMC dan RMC yang

Tabel 10
Matriks Klasifikasi Model Regresi I

Observed		Predicted			
		RMC		Percentage Corect	
		0	1		
Step 1	RMC	0	47	60	43,9
		1	23	118	83,7
Overall Percentage					66,5

Tabel 11
Matriks Klasifikasi Model Regresi II

Observed		Predicted			
		SRMC		Percentage Corect	
		0	1		
Step 1	SRMC	0	98	4	96,1
		1	23	16	41,0
Overall Percentage					80,9

terpisah dari audit (SRMC). Sementara itu, variabel komisaris independen, ukuran dewan, reputasi auditor, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, dan *leverage* tidak berhubungan dengan keberadaan RMC dan SRMC.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : (1) data mengenai efektivitas dewan komisaris maka masih sangat terbatas sehingga masih menggunakan proksi komisaris independen. (2) pengukuran variabel risiko dengan menggunakan jumlah piutang dan persediaan tidak signifikan.

Saran untuk penelitian mendatang: (1) Selain data sekunder juga menggunakan data yang lain seperti kuesioner ataupun *interview* untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai keberadaan dan struktur RMC sehingga dapat menggambarkan fungsi dan keberadaan RMC diperusahaan dengan lebih baik, (2) sebaiknya digunakan pengukuran berbeda untuk variabel risiko, misal *intangible asset*, (3) menggunakan ukuran lain untuk dewan komisaris misalnya latar belakang pendidikan anggota komisaris yang mendukung, (4) tahun pengamatan yang lebih panjang sehingga dapat mengetahui perkembangan RMC di Indonesia, (5) menambah variabel lainnya karena R^2

masih kecil (16,6% dan 24,6%) misalnya kepemilikan institusi, (6) Industri/ sektor kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap pembentukan komite pemantau risiko karena industri berpengaruh terhadap risiko bisnis maupun keuangan. Oleh sebab itu penelitian ke depan menyertakan faktor industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2006. *Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/206 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*. Jakarta.
- Bates, E.W., and R.J. Leclerc. 2009. Boards of Directors and Risk Committees. *The Corporate Governance Advisor*, 17(6), 16-18
- Beasley, M.S. 2007. *Audit Committee Involvement in Risk Management Oversight*. Diakses tanggal 2 Desember 2009, www.aicpa.org/.../Audit_Committee_Risk_Management.
- Carson, E. 2002. Factors Associated With The Development of Board Sub-Committees. *Corporate Governance : An International Review*, 10(1), 4-18.

- Chai, C. X., D. Hillier, G. Tian, and Q. Wu. 2009. *Agency Costs of Government Ownership : A Study of Voluntary Audit Committees Formation in China*. Diakses tanggal 2 Desember 2009, <http://ssrn.com/abstract=1339232>
- Chen, L., A. Kilgore, dan R. Radich. 2009. Audit Committees : Voluntary Formation by ASX Non-Top 500. *Managerial Auditing Journal*, 24(5), 475-493.
- Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission. 2009. *Effective Enterprise Risk Oversight, The Role of Board of Directors*. Diakses tanggal 12 November 2009. <http://coso.org>
- Firth, M. and O.M. Rui. 2007. Voluntary Audit Committee Formation and Agency Costs. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 4 (2), 142-160.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harrison, J.R. 1987. The Strategic Use of Corporate Board Committees. *California Management Review*, 30(1), p.109-125.
- Jensen, M.C. and W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm : Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Korosec, B. and R. Horvat. 2005. Risk Reporting in Corporate Annual Reports. *Economic and Business Review*, 7(3), 217-237.
- KPMG. 2001. *Enterprise Risk Management : An Emerging Model For Building Shareholder Value*. Diakses tanggal 12 November 2009, www.aci.kpmg.com.hk
- KPMG. 2005. *Strategic Risk Management Survey*. diakses tanggal 12 November 2009. www.kpmg.com.au
- Krus, C.M., and H. L. Orowitz. 2009. The Risk-Adjusted Board : How Should The Board Manage Risk?. *Corporate Governance Advisor*, 17(2), 1-6
- Mahendra, T. 2008. Analisis Efisiensi Pasar Modal Indonesia Periode 2003-2005 (Studi Pada PT. Bursa Efek Jakarta). *Tesis*, Universitas Muhammadiyah.
- Ruigrok, W., S. Peck, S. Tacheva, P. Greve, and Yan Hu. 2006. The Determinants and Effects of Board Nomination Committees. *Journal of Management Governance*, 10, 119-148.
- Spira, L.F. and R. Bender. 2004. Compare and Contrast : Perspectives on Board Committees. *Corporate Governance*, 12(4), 489-499.
- Subramaniam, N., L. McManus, and J.Zhang. 2009. Corporate Governance, Firm Characteristics, and Risk Management Committee Formation in Australia Companies. *Managerial Auditing Journal*, 24(4), 316-339.
- Utama, Sidharta dan F. Leonardo, Z. 2004. Evidence on Audit Committee Composition and Audit Committee Effectiveness Among Listed Companies in the Jakarta Stock Exchange. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 128-142.
- Walter, T.S. 1984. Australian Takeovers : Capital Market Efficiency and Shareholder Risk and Return. *Australian Journal of Management*, 9(1), 63-118